

**PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN DI KAWASAN
PERBATASAN SEMARANG-DEMAK**

TUGAS AKHIR

Oleh :

**ANJAR UTOMO BRAHMANTIYO
L2D 002 386**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

ABSTRAKSI

Kawasan perbatasan memiliki karakteristik fungsional yang berbeda dengan fungsional lainnya, hal ini disebabkan oleh adanya garis administratif yang memisahkan dua kawasan berbeda. Kecamatan Sayung sebagai bagian administratif dari Kabupaten Demak, merupakan kawasan perbatasan dengan Kecamatan Genuk, sebagai bagian dari Semarang yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Penggunaan lahan permukiman yang mendukung aktivitas perkotaan di kawasan perbatasan ini ialah sebesar 23% (BPS: Kecamatan dalam Angka, 2004). Ketersediaan dan pelayanan sarana pendidikan, khususnya pendidikan menengah di Kecamatan Genuk ternyata mampu melayani hingga 12% penduduk bersekolah di Kecamatan Sayung (Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2006). Hal ini menjadi masalah penelitian, dimana masyarakat di Kecamatan Genuk dan Sayung khususnya, berhak mendapatkan pelayanan terbaik di daerah terdekat tanpa harus melakukan perjalanan jauh bahkan hingga ke kota lain, hanya untuk mendapat pelayanan pendidikan menengah. Tujuan utama pelayanan sarana pendidikan yang seharusnya ialah mengedepankan kepuasan publik dan pengguna. Bagaimanakah pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan? Apakah dikarenakan oleh perbedaan kualitas/ kondisi pelayanan, masalah aksesibilitas, arah kecenderungan dan jangkauan wilayah pelayanan, pengelolaan atau lainnya dapat mengakibatkan terjadinya interaksi antarwilayah. Peran ini tidak hanya sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, melainkan juga stakeholder lain termasuk swasta dan masyarakat.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kondisi pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan Semarang-Demak. Dengan mengambil wilayah studi Kecamatan Genuk dan Sayung. Pencapaian tujuan dilakukan melalui analisis ketersediaan sarana pendidikan yang mengacu pada ketentuan normatif Kepmen PU No.13/KPTS/1987 dan data sekunder yang menghasilkan temuan ketersediaan sarana pendidikan di Genuk dan Sayung. Analisis kualitas pelayanan sarana pendidikan, merupakan perbandingan analisis sebelumnya dengan menggunakan persepsi pengguna sarana pendidikan lintas batas. Analisis pergerakan penduduk pengguna sarana pendidikan, serta kajian komprehensif interaksi pelayanan sarana pendidikan di Kecamatan Genuk dan Sayung, kawasan perbatasan Semarang-Demak sehingga mampu menjawab alasan, penyebab dan pengelompokan pemanfaatan sarana pendidikan lintas batas.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan campuran, kuantitatif-kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana pendidikan dan kualitas pelayanan berdasarkan standar yang ada. Untuk kemudian dilakukan kajian lebih dalam mengenai pelayanan sarana pendidikan menengah di kawasan perbatasan Semarang-Demak menggunakan pendekatan deskriptif.

Kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan ialah bahwa pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan, turut mengakibatkan hubungan interaksi di kawasan perbatasan. Kondisi keterhubungan ini diakibatkan oleh ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana pendidikan di Genuk dalam kondisi memuaskan, dibanding di Sayung dalam kondisi cukup, sehingga berakibat terjadinya pergerakan ke arah Kecamatan Genuk. Kondisi pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor pendukung lain, yaitu transportasi dan regulasi. Sektor transportasi yang mendukung pergerakan lintas batas, 38% pengguna didukung oleh kemudahan angkutan, dan tersedianya Jl. Kaligawe sebagai jalur arteri primer. Rekomendasi untuk pihak terkait penyedia pelayanan sarana pendidikan ialah peningkatan mutu sekolah sesuai standar penyediaan sekolah menengah, penambahan sarana pendidikan dan penambahan ruang kelas untuk sekolah yang kelebihan murid, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pendidikan. Kemudian perlu pemerataan pelayanan yang dapat didukung oleh rayonisasi yang sesuai, perbaikan jalan lingkungan dan penambahan trayek angkutan untuk memudahkan pencapaian siswa sekolah serta perlu disusun arahan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pengoptimalan terhadap kondisi pelayanan sarana pendidikan, agar tujuan pemerataan pendidikan lebih terarah.

Kata Kunci: pelayanan, sarana pendidikan, kawasan perbatasan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aktivitas di pusat kota, mendorong pergerakan penduduk ke kawasan pinggiran, sehingga mengakibatkan pula perkembangan kawasan pinggiran. Semakin meluasnya kawasan terbangun kota akan membentuk pola tata ruang wilayah pada daerah pinggiran sebagai akibat tingginya tingkat biaya di pusat kota sehingga kegiatan perkotaan akan bergeser ke arah pinggiran (Rugg,1991). Kawasan pinggiran merupakan kawasan dengan fungsi sebagai kawasan penyangga, untuk mendukung aktivitas utama di pusat kota. Hubungan pusat dan kawasan pinggiran tersebut secara esensial tidak berbeda dengan hubungan daerah metropolitan dengan kawasan perbatasan (Friedmann dalam Daldjoeni,1992).

Kawasan pinggiran yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi berbagai aspek yang mendukung perkembangannya, diantaranya ialah peningkatan jumlah perumahan dan permukiman di kawasan pinggiran. Hal yang terjadi di Indonesia selama ini pada awal pertumbuhannya, kota masih terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan utama di pusat kota. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi bagian wilayah kota yang lain juga berkembang pesat dan meluas, bahkan telah melebihi batas administrasi kota itu sendiri (Yunus, 2000:61).

Batas administratif yang memisahkan dua wilayah, mempunyai berbagai fungsi serta memberikan dampak yang beragam. Garis administratif yang dalam kondisi riil tidak nampak dan hanya berupa garis maya saja, ternyata tetap dapat dirasakan dan dibuktikan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan fungsi, perbedaan karakteristik penduduk, perbedaan hirarki antara dua wilayah, dan sebagainya. Hal – hal inilah yang disebut sebagai kawasan perbatasan antara dua daerah, yaitu kawasan dengan adanya garis administratif yang memisahkan dua wilayah administratif, dalam hal ini membatasi antara dua Kabupaten/Kota.

Berbagai kondisi yang unik dan menarik dapat ditemukan di kawasan perbatasan, terkait dengan tumbuh dan kembangnya kedua kawasan yang berbatasan langsung. Berbagai potensi dan masalah yang ada menjadikan kawasan perbatasan berpotensi besar, sekaligus rawan akan konflik kepentingan. Potensi yang dimiliki kawasan perbatasan, diantaranya ialah karena wilayah inilah yang lebih dekat berinteraksi dengan wilayah lain. Sedangkan permasalahan dari pertumbuhan dan perkembangan yang terus-menerus diikuti dengan meluasnya wilayah hingga ke luar batas-batas administratif ini akan memicu munculnya permasalahan manajemen kota (Yunus, 2000:220).

Kawasan perbatasan merupakan kawasan tempat bertemunya berbagai kepentingan dan pengaruh yang berasal dari daerah-daerah yang memiliki garis perbatasan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi tempat yang menarik untuk diteliti, khususnya dikaitkan dengan pengaruhnya tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan, termasuk terhadap kegiatan-kegiatan dan bentuk pemenuhan pelayanan, kebutuhan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Tentunya keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta sangat penting sebagai *stakeholders* yang terlibat langsung aktif di kawasan perbatasan.

Keberadaan kawasan perbatasan dengan peningkatan aktivitasnya yang senantiasa tumbuh dan berkembang membutuhkan konsekuensi yaitu peningkatan kebutuhan akan sarana umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Beberapa alasan yang menjadikan pentingnya perencanaan sarana umum dilakukan, ialah dari perspektif penggunaan sosial dan perspektif pasar. Perspektif sosial ialah pentingnya sarana umum sebagai alat pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Sedangkan perspektif pasar, sarana umum direncanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan. (Cahyani,2004:38). Hal ini disadari bahwa tanpa adanya penyediaan sarana umum pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya (Chapin,1995:67).

Peranan sarana umum dan sosial sebagai penopang utama pembangunan wilayah dan kota dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap keberlangsungan aktivitas penduduk dalam suatu wilayah, dimana setiap aktivitas yang berlangsung senantiasa membutuhkan sarana umum yang mampu memudahkan aktivitas tersebut. Perkembangan aktivitas di kawasan perbatasan juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan pinggiran kota, dengan fungsionalitas umum sebagai kawasan perumahan dan permukiman. Sarana umum yang biasanya mendapat perhatian lebih biasanya difokuskan kepada sarana umum permukiman, yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perbelanjaan dan niaga, sarana olahraga dan lapangan terbuka.

Sarana pendidikan sebagai sarana terpenting dan mendasar bagi manusia untuk belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan juga mempunyai arti penting bagi manusia, karena dengan pendidikan dapat memberikan keterampilan, pengetahuan dan nilai – nilai pada masyarakat. Peran pendidikan juga menstimulir dan menyertai perubahan – perubahan serta perkembangan yang ada di masyarakat (Tim IKIP, 1980:215). Sarana pendidikan dapat dibagi menjadi sarana penunjang pelayanan pendidikan, dan prasarana/ utilitas pelayanan pendidikan. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada berikut kelengkapannya.

Tercapainya tujuan pembangunan tidak dapat tercapai tanpa adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan Dr. E. N. M. Gooding (Tim IKIP,1980: 219) bahwa mengikutsertakan pendidikan dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Pendidikan dalam pembangunan juga dituntut untuk mengemban tugas yang semakin luas dan kompleks sesuai dengan aneka ragam masalah yang terjadi di masyarakat.

Peran pendidikan sebagai *prima mover* dalam proses pembangunan (Mardiana, 2006: 12). Secara fisik, pendidikan berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari segala strata dan segala bidang bagi pembangunan. Sedangkan dari aspek non-fisik, pendidikan berhasil menanamkan semangat dan jiwa modern, yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan yang tinggi pada “akal” dan teknologi, demi menciptakan masa depan yang didambakan (Zamroni,2003: 10).

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan Kota Semarang. Terdapat empat Kabupaten yang langsung berhadapan dengan Ibukota Propinsi Jawa Tengah ini, yaitu Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, dan Demak. Pertumbuhan keempat kabupaten ini amat terpengaruh dan tergantung dari Kota Semarang. Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan Kota Semarang juga amat terpengaruh dan tergantung dari keempat kabupaten tersebut.

TABEL I. 1
JUMLAH SEKOLAH DAN MURID
DI KECAMATAN GENUK DAN SAYUNG TAHUN 2006

No.	TINGKATAN	GENUK		SAYUNG	
		Jml Sekolah	Murid	Jml Sekolah	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	31	1641	21	1026
2	Sekolah Dasar Negeri	34	6133	46	12763
3	Setingkat SD (M I)	5	715	5	830
4	SMP Negeri	1	792	2	1676
5	SMP/MTS Swasta	11	2382	9	3328
6	SMA/SMK Negeri	2	1340	2	535
7	SMA/MA Swasta	6	1835	7	1234
TOTAL		90	14838	92	21392

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Kabupaten Demak ,2006